

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi sangat penting karena menjadi dasar dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang nantinya akan berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Bagi pihak eksternal seperti investor dan kreditor, mereka sangat membutuhkan informasi keuangan yang baik sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kegiatan investasi mereka. Informasi keuangan yang baik dapat diperoleh dari laporan keuangan yang disusun sesuai dengan karakteristik kualitatif yang pokok menurut IAI (2009:7) terdapat empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Untuk menjamin hal tersebut, maka diperlukan peran auditor eksternal yang independen untuk melakukan proses audit atas laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meyakinkan para investor, kreditor dan pihak eksternal lainnya jika laporan keuangan sebuah perusahaan telah disajikan dengan baik sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Perusahaan perlu mengeluarkan sejumlah biaya untuk membayar jasa auditor eksternal yang disebut dengan *audit fee*. *Audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan dalam meningkatkan pengawasan manajemen, kualitas laporan keuangan perusahaan dan independensi manajemen. *Audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat membantu pencapaian tersebut.

Hingga saat ini, masalah terkait *audit fee* yang dirasa tidak sesuai masih banyak diperbincangkan. Pada situs iapi.com tanggal 23 Oktober 2013 memuat suatu berita yang menyatakan bahwa akuntan publik diminta untuk menaikkan fee audit. Ketua IAPI, Tarkosunaryo, mengatakan bahwa pendapatan per kapita industri jasa Akuntan Publik pada tahun 2013 hanya sekitar USD 4.167 per kapita atau 20% diatas pendapatan per kapita nasional tahun 2012 sekitar USD 3.420. Selanjutnya Tarko menyatakan pendapat bahwa pendapatan per kapita jasa Akuntan Publik tersebut tergolong rendah, sedangkan profesi Akuntan Publik adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tarko mengajak semua Akuntan Publik di Indonesia untuk memperhatikan fee jasa audit dan jasa lainnya dan tidak menjual dengan harga murah, seraya berharap rasio pendapatan per kapita jasa Akuntansi Publik dapat ditingkatkan berlipat ganda.

Selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan merubah sistem bekerja pegawai yang biasanya selalu di kantor atau yang diistilahkan sebagai *work from office* (WFO) menjadi *work from home* (WFH) dimana sebagian atau mayoritas pekerjaan dilakukan di rumah pegawai masing-masing.

Dalam studi oleh Khaldoon Albitar et Al (2020) yang berjudul "*Auditing in Times of Social Distancing: The Effect of COVID-19 on Auditing Quality*", di saat *social distancing* dan bekerja dari rumah menjadi normal baru selama pandemi COVID-19. Hal ini tampaknya meningkatkan jam kerja dan upaya auditor, meskipun perusahaan (klien) cenderung mulai meminta penurunan *audit fee*. Penurunan *audit fee* yang diharapkan ini tampaknya kemungkinan besar akan mempengaruhi kualitas audit selama wabah COVID-19.

Xu et Al. (2013) mempelajari di Australia dan melaporkan peningkatan *audit fee* selama krisis keuangan. Khaldoon Albitar et Al (2020) berpendapat bahwa hal ini disebabkan karena peningkatan risiko bisnis klien, yang menyebabkan upaya audit tambahan. Meskipun demikian, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa selama krisis keuangan global, perusahaan menegosiasikan harga yang lebih rendah untuk jasa audit.

Menurut *International Federation of Accountants* (2020), klien dibawah tekanan keuangan tidak dapat membayar *audit fee* atau berusaha untuk menurunkan *audit fee*. Hal ini membuat auditor harus mengalami kesulitan dengan klien mengenai *audit fee*.

Menurut IAPI (Juli 2020) terkait dengan *audit fee* dalam masa pandemi, *cost infrastructure* KAP mengalami kenaikan dibandingkan dengan kemampuan ekonomi / bisnis klien yang menurun. Dalam hal ini IAPI melakukan perencanaan perhitungan secara tepat dan analisa risiko signifikan atas penambahan prosedur alternatif untuk memperoleh keyakinan memadai.

Dilansir reuters.com memuat salah satu berita mengenai masalah pemberian *audit fee* terjadi pada Perusahaan Toshiba. Kasus Toshiba membuat pertanyaan di kalangan ahli akuntansi tentang rendahnya *audit fee* yang dibayarkan Perusahaan Jepang terhadap auditornya dimana jika *audit fee* rendah berarti mereka tidak memiliki cukup waktu maupun sumber daya terkait audit Perusahaan Toshiba, apalagi jika penyimpangan akuntansi terjadi dengan keterlibatan manajemen puncak sehingga tingkat deteksi menjadi lebih sulit. "Salah satu masalah yang terjadi di Jepang adalah *audit fee* yang dibayar oleh perusahaan sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata internasional," kata Robert Medd, seorang partner di GMT Penelitian di Hong Kong. Menurutnya biaya dapat memberikan proxy kasar dalam menghitung waktu yang dihabiskan untuk audit, dan *audit fee* dapat dijadikan proporsi dalam pendapatan perusahaan (<http://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting>).

Selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan merubah sistem bekerja pegawai yang biasanya selalu di kantor atau yang diistilahkan sebagai *work from office* (WFO) menjadi *work from home* (WFH) dimana sebagian atau mayoritas pekerjaan dilakukan di rumah pegawai masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

Dilansir dari kumparan.com, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Indonesia juga terkena imbasnya pada saat pandemi. Ketika KAP tersebut tengah melakukan tugasnya seperti melakukan audit pada sebuah perusahaan, maka tugas seorang auditor akan terganggu seperti ketika akan mengambil sebuah data di perusahaan tersebut, melakukan penyetoran pajak atau ketika akan menilai kegiatan

atau aktivitas pada perusahaan tersebut akan terganggu dan juga semua karyawan disarankan untuk bekerja di rumah (WFH).

Walaupun akuntan melakukan WFH (*Work From Home*), maka pekerjaan tersebut tetap jalan dan dengan adanya WFH ini tidak mengganggu jalannya pengauditan. Dan juga akuntan ketika menjalankan tugasnya di rumah, maka data-data yang diidentifikasi akan berkurang. Disinilah kejujuran seorang akuntan diuji yaitu walaupun data yang diambil tidak lengkap seorang akuntan tidak boleh memanipulasi data tersebut dan tidak melakukan kecurangan karena akan sangat mempengaruhi hasil dari kesimpulan yang diambil untuk perusahaan tersebut. Maka untuk itu dalam proses identifikasi seorang akuntan harus berhati-hati dan bersikap objektivitas. Oleh karena itu seorang akuntan harus bisa menjaga etikanya walaupun di masa pandemi saat ini COVID-19, agar menjaga kepercayaan perusahaan dan juga ketika pengambilan keputusan tidak disertai adanya kesalahan.

Penggunaan teknologi memang sudah tidak asing lagi dalam dunia pengawasan, khususnya bagi organisasi auditor internal di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ditengah pandemi COVID-19 saat ini, pemanfaatan teknologi tersebut dirasakan sangat membantu khususnya dalam proses audit jarak jauh (*remote audit*) karena maraknya pembatasan akses hampir di seluruh wilayah. Dilansir dari The IIA Indonesia (2020), proses audit jarak jauh dinilai cukup menantang dan membutuhkan perencanaan yang matang mulai dari proses pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik lapangan, wawancara dan pertemuan penutupan.

Proses audit jarak jauh (*remote audit*) mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya. Menurut Ryan A. Teeter et Al (2010), konsep audit jarak jauh (*remote audit*) sebagai proses dimana auditor internal memasang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan prosedur analitis untuk mengumpulkan bukti elektronik, berinteraksi dengan auditee, dan melaporkan keakuratan data keuangan dan pengendalian internal, terlepas dari lokasi fisik auditor. Dengan adanya TIK dan analisis audit otomatis memungkinkan auditor untuk bekerja dari jarak jauh, mengurangi biaya perjalanan dan latensi, serta meningkatkan efisiensi dan cakupan.

Namun, walaupun menggunakan sistem yang terkomputerisasi, pengendalian tetap harus diterapkan guna mengurangi resiko kesalahan dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar akurat. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk menggunakan *Generalized Audit Software* yang didesain untuk melaksanakan audit atas aplikasi-aplikasi yang terkomputerisasi. Dalam artikel tentang perbandingan software audit terbaik yang dikutip pada sebuah *FraudMagazine*, pada kenyataannya beberapa software siap digunakan di dunia bisnis dalam pendeteksian fraud seperti Excel, Access, IDEA, ACL dan lainnya (Rich Lanza, *Fraud Magazine*, 1998).

Penggunaan teknologi informasi dalam proses audit juga memiliki kelemahan. Disaat sistem pemrosesan data elektronik auditee menjadi lebih kompleks, penting bagi auditor untuk dapat melakukan aktivitas audit melalui

komputer. Kebanyakan dari sistem audit yang terkomputerisasi yang saat ini digunakan tidak dapat langsung mengakses data klien secara *online*. Auditor biasanya mengumpulkan file data historis dari personel auditee (Liang dkk., 2001; Syaikh, 2005). Situasi ini menciptakan kemungkinan bahwa auditor dapat diberi data yang dimanipulasi.. Selain itu, data elektronik yang dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang sulit untuk dideteksi selamanya jika tidak ada pengendalian internal yang memadai pada tempatnya (Lanza, 1998).

Selain itu, dalam studi oleh Khaddash dan Syam (2003) yang berjudul, "*The Extent of Auditors Accepting to Use Information Technology*", *Field Study on Auditing Offices in Jordan*." juga membahas mengenai hambatan yang terdapat dalam penggunaan teknologi informasi dalam auditing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa auditor memandang pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam audit karena memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan akurasi, keberhasilan dan mengurangi biaya. Namun demikian, penggunaan teknologi informasi sebenarnya belum mencapai hasil yang diharapkan karena beberapa kendala, seperti: Beberapa perusahaan klien yang masih menggunakan sistem akuntansi tradisional, kurangnya pengalaman dan keterampilan auditor, dan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi dan auditing.

Salah satu contoh kasus mengenai Teknologi Informasi Komunikasi dalam audit yaitu kasus yang diungkapkan pada Arens et al (2011: 419), klien audit Fauzi Asmoro, PT Priyanka Super Store, memasang sebuah program komputer yang dapat memproses dan menghitung jatuh tempo akun piutang pelanggan. Daftar

jatuh tempo piutang pelanggan, yang mengindikasikan berapa lama piutang pelanggan belum tertagih, sangat berguna bagi Fauzi untuk mengevaluasi ketertagihan piutang-piutang tersebut. Karena Fauzi tidak mengetahui apakah total perhitungan umur piutang sudah dihitung dengan benar, ia memutuskan untuk menguji perhitungan PT Priyanka dengan menggunakan perangkat lunak audit yang dimiliki KAP-nya, untuk menghitung ulang umur piutang, dengan menggunakan salinan data elektronik akun piutang pelanggan milik PT Priyanka. Ia beralasan bahwa jika perhitungan umur piutang dengan menggunakan perangkat lunak audit hasilnya relatif sama dengan perhitungan PT Priyanka, maka ia dapat membuktikan bahwa perhitungan umur piutang PT Priyanka sudah benar. Pada kenyataannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil perhitungan umur piutangnya dengan hasil perhitungan dari PT Priyanka. Manajer teknologi informasi PT Priyanka, Rusman Adji, menyelidiki perbedaan tersebut dan menemukan adanya kesalahan yang dilakukan program sehingga menyebabkan kesalahan rancangan program di PT Priyanka yang digunakan dalam perhitungan umur piutang. Hal tersebut membuat Fauzi menaikkan jumlah pengujian saldo akun penyisihan piutang tak tertagih pada akhir tahun secara signifikan.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang sering digunakan dalam sebuah penelitian. Hal ini disebabkan karena biasanya perusahaan yang memiliki ukuran besar, perusahaan tersebut pasti memiliki sistem pengendalian yang baik sehingga dapat mengurangi kesalahan yang ada di dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan.

Salah satu fenomena terkait dengan ukuran perusahaan klien yaitu perlambatan ekonomi global membuat Coca-Cola harus melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) agar selamat dan kembali ke jalur semula. Dalam laporan keuangannya, Coca-Cola mengatakan bahwa pemberhentian hubungan kerja ini merupakan bagian dari rencana pemotongan *cost* yang lebih luas, yang bertujuan menghemat USD800 juta. CEO Coca-Cola mengatakan bahwa keseluruhan penjualan turun 11 persen dari tahun lalu dan keuntungan mereka turun 20 persen. Penurunan tersebut terjadi karena selera konsumen telah beralih dari minuman bergula. Sayangnya, penjualan dan saham Coke juga telah tertinggal dari saingan utamanya Pepsi selama beberapa tahun terakhir (<https://economy.okezone.com/>).

Dari fenomena ini diketahui rendahnya pertumbuhan PT Coca-Cola dilihat dari tertinggalnya penjualan dan saham Coca-Cola dari saingannya pepsi. Menurut Permana Sari (2012) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan bisa diukur dengan total aktiva, penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Remote Audit* dan Ukuran Perusahaan Klien terhadap *Audit fee* (Studi Kasus pada KAP Wilayah Kota Pekanbaru)**”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Banyak perusahaan menekan auditor untuk mengurangi *audit fee* mereka pada saat Pandemi COVID-19, sehingga auditor mengalami kesulitan dalam penetapan *audit fee* akibat permintaan klien (perusahaan) tersebut.
2. Terdapat perusahaan dengan ukuran besar yang memberikan *audit fee* rendah dan tidak sesuai dengan rata-rata tarif pemberian *audit fee* untuk ukuran perusahaan besar sehingga auditor mengurangi waktu audit maupun sumber daya auditor untuk mengaudit.
3. Akibat penerapan *social distancing* selama pandemi COVID-19, proses audit dilakukan dalam jarak jauh dengan berbasis teknologi, sehingga KAP memerlukan lebih banyak sumber daya auditor yang memahami IT (Informasi dan Teknologi).
4. Kebanyakan dari sistem audit yang terkomputerisasi yang saat ini digunakan tidak dapat langsung mengakses data klien secara *online* yang kemungkinan auditor dapat diberi data yang dimanipulasi oleh klien.
5. Perusahaan dengan ukuran besar harus melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan bagian dari rencana

pemotongan *cost* yang lebih luas, sehingga mengakibatkan keseluruhan penjualan dan keuntungan menurun dari tahun sebelumnya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai pencapaian sasaran dalam penyusunan penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *remote audit* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru.
2. Bagaimana ukuran perusahaan klien (*client company size*) pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru.
3. Bagaimana penetapan *audit fee* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru.
4. Bagaimana hubungan *remote audit* dan ukuran perusahaan klien pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru.
5. Bagaimana pengaruh *remote audit* terhadap penetapan *audit fee* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru.
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap *audit fee* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru.
7. Bagaimana pengaruh *remote audit* dan ukuran perusahaan klien secara simultan terhadap *audit fee* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *remote audit* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui ukuran perusahaan klien pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru
3. Untuk mengetahui penetapan *audit fee* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru
4. Untuk mengetahui hubungan *remote audit* dan ukuran perusahaan klien pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *remote audit* terhadap *audit fee* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap *audit fee* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *remote audit* dan ukuran perusahaan klien secara simultan terhadap *audit fee* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara langsung dan tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan yang sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis

ambil. Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu secara praktis dan teoritis sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Untuk mengadakan studi perbandingan antara pengetahuan teoritis yang diterima penulis selama masa perkuliahan dan dari literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam praktik pada perusahaan yang dijadikan objek penelitian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperbanyak pengetahuan di bidang akuntansi yang berhubungan dengan pelaksanaan *remote audit* dan ukuran perusahaan klien serta *audit fee*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran pengaruh *remote audit* dan ukuran perusahaan klien terhadap *audit fee* yang dihasilkan. Selain itu penulis juga dapat mengetahui sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. Serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh sidang Sarjana Akuntansi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai bahan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan – kebijakan terkait dengan pelaksanaan *remote audit* dan ukuran perusahaan klien bagi auditor eksternal terhadap *audit fee*.

3. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa / pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan audit yang menyangkut *remote audit*, ukuran perusahaan klien, dan *audit fee*.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian ini mulai pada Bulan April 2021.